

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat luas, dengan lebih dari 17.000 pulau, dan terdapat kesenjangan pembangunan yang sangat mencolok antar wilayah. Meskipun telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa dekade terakhir, masih menghadapi masalah kemiskinan yang cukup serius. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 9,22% dari penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini mencerminkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah terpencil dan di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, Indonesia menjadi konteks yang tepat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran.

Pembangunan ekonomi dianggap sebagai ukuran utama bagi negara-negara yang sedang dalam tahap berkembang. Secara sederhana, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya atau proses untuk membawa perubahan yang lebih baik dibanding sebelumnya atau untuk meningkatkan standar kualitas hidup sehingga kesejahteraan dan kemakmuran menjadi lebih tinggi. Pembangunan ekonomi juga berkaitan erat dengan penciptaan, pemeliharaan, dan peningkatan pendapatan nasional. Namun, salah satu penyebab yang dapat mengakibatkan keterbelakangan dan menghambat proses pembangunan di suatu negara adalah tingginya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan secara umum dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menggunakan garis kemiskinan untuk mengukur jumlah orang yang hidup di bawah ambang batas pendapatan tertentu yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemiskinan dibagi menjadi dua kategori yaitu :

1. Kemiskinan absolut, yaitu kondisi kemiskinan yang diukur berdasarkan kebutuhan dasar minimum yang harus dipenuhi oleh individu atau keluarga untuk hidup layak.
2. Kemiskinan relative, yaitu kemiskinan yang dilihat dalam konteks ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan didalam masyarakat, dimana seseorang dianggap miskin jika ia memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata rata pendapatan masyarakat.

Indikator kemiskinan meliputi kurangnya modal, rendahnya produktivitas, pendapatan yang minim, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya nilai tukar produk untuk masyarakat miskin, serta kekurangan dalam peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya untuk mengurangi dan mengatasi kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan dengan cara yang terkoordinasi. Indonesia menganggap kemiskinan sebagai masalah utama, tetapi belum memiliki strategi yang efektif untuk mengatasinya. Menurut Bank Dunia (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah

pendapatan yang rendah serta kurangnya aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, dengan banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan resmi. Ini menyebabkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas sumber daya manusia. IPM juga bisa diartikan sebagai ukuran yang menggabungkan dimensi kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup (pendapatan per kapita). IPM memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kesejahteraan masyarakat dibandingkan hanya menggunakan indikator ekonomi. Rendahnya IPM akan berdampak pada rendahnya produktivitas kerja masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan beberapa langkah yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Peningkatan mutu sumber daya manusia bisa dilakukan dengan berbagai kebijakan, seperti pengembangan pendidikan yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi di masa depan, peningkatan kesehatan melalui promosi gaya hidup sehat serta perbaikan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin, dapat dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis (Mulyadi, 2012). Pembangunan manusia di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel I.1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2014-2023

Tahun	Jumlah (Indeks)
2014	75,60
2015	75,90
2016	76,00
2017	71,00
2018	71,20
2019	71,30
2020	71,80
2021	72,10
2022	72,30
2023	77,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2014-2023 dimana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 77,40%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah. IPM dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan bertujuan untuk menilai kualitas hidup seseorang, bukan hanya berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan per kapita semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Ketiga aspek ini memiliki arti yang cukup luas karena

berkaitan dengan berbagai faktor. Untuk menilai aspek kesehatan, digunakan angka harapan hidup pada saat lahir. Sedangkan untuk menilai aspek pengetahuan, digunakan kombinasi indikator angka melek huruf dan rata-rata lama pendidikan. Sementara untuk menilai aspek kehidupan layak, digunakan indikator daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar yang diukur dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mencerminkan kemajuan pembangunan untuk kehidupan yang layak.

Indikator lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia adalah pengangguran. Pengangguran muncul akibat ketidaksesuaian antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran bisa terjadi meskipun ada banyak kesempatan kerja, tetapi disebabkan oleh kurangnya informasi, perbedaan antara keterampilan yang ada dan yang dibutuhkan, atau bahkan karena pilihan untuk tidak bekerja.

Tabel I.2 Jumlah Pengangguran di Indonesia Tahun 2014-2023

Tahun	Jumlah (jiwa)
2014	7.244,91
2015	7.560,82
2016	7.031,78
2017	7.040,32
2018	7.073,39
2019	7.104,42
2020	9.767,75
2021	9.102,05
2022	8.425,93
2023	7.855,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengangguran cenderung mengalami jumlah fluktuasi. Tepat pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7.855,08 jiwa.

Jumlah pengangguran yang semakin tinggi akan membawa berbagai efek pada proses pembangunan ekonomi. Agar tidak berlanjut, pemerintah perlu menangani masalah pengangguran, karena isu pengangguran merupakan masalah utama dan sensitif untuk kestabilan ekonomi dan keamanan suatu negara. Pengangguran yang berkepanjangan dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, meningkatkan ketidakstabilan ekonomi, serta memperburuk keadaan sosial.

Hubungan antara IPM, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia sangat penting untuk dipahami. Dengan menganalisis dampak IPM dan pengangguran pada

tingkat kemiskinan, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada kemiskinan. Ini juga dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak IPM dan pengangguran pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman tentang dinamika kemiskinan dan bagaimana pembangunan manusia serta penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengatasi masalah ini.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia masih relatif tinggi yaitu sebesar 77,40% pada tahun 2023.
2. Tingkat pengangguran di Indonesia periode 2014-2023 cenderung mengalami fluktuasi
3. Angka kemiskinan di Indonesia masih terbilang tinggi, meskipun sudah banyak program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi permasalahan pada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur berdasarkan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, serta tingkat pengangguran sebagai variabel independen terhadap tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode 2014-2023.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah dapat dikaji dan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bahwa indeks pembangunan manusia dan pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Memberikan masukan kebijakan berdasarkan hasil penelitian untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan IPM dan

pengurangan pengangguran.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis : sarana untuk menambah wawasan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.
2. Praktis : memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks gabungan yang dipakai untuk menilai kualitas hidup manusia yang diukur melalui tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli (ekonomi). Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh UNDP melalui laporan pembangunan manusia pada tahun 1996, yang kemudian diterbitkan setiap tahun. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperluas pilihan dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara khusus UNDP mengidentifikasi empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. (Sitanggang, 2020:225).

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihanpilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Menurut Badan Pusat Statistik, IPM digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar yang menentukan kualitas hidup. IPM tersusun dari tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan tingkat pendidikan seseorang seringkali berhubungan dengan peningkatan pendapatan atau gaji yang diperoleh. Jika pendapatan mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang

yang memiliki pendidikan tinggi atau telah mengikuti pelatihan yang baik, semakin tinggi produktivitas mereka, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Selain pendidikan, kesehatan juga memainkan peran penting dalam peningkatan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan mencakup peningkatan partisipasi angkatan kerja ketika kesehatan penduduk membaik. Perbaikan dalam kesehatan juga dapat membawa dampak positif terhadap tingkat pendidikan dan perkembangan potensi individu, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan berdasarkan tingkat pengeluaran rata-rata. Semakin tinggi pengeluaran kapita, semakin baik kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Fahrikaa *et al*, 2020:111). Oleh sebab itu, ketika nilai IPM suatu daerah tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat akan lebih baik, dan tingkat kemiskinan juga rendah.

2.1.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Indeks Pendidikan

Penghitungan indeks pendidikan melibatkan dua indikator, yaitu tingkat melek huruf (LIT) dan rata-rata lamanya sekolah (MYS). Populasi yang terlibat dalam penelitian ini adalah individu yang berusia 15 tahun ke atas, mengingat bahwa sebagian dari mereka telah menghentikan pendidikan formal mereka pada usia tersebut. Penetapan ini penting untuk menjadikan angka tersebut lebih akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk yang

usianya di bawah 15 tahun masih berada dalam masa sekolah atau akan memasuki masa sekolah, sehingga belum waktunya untuk mengukur rata-rata lama pendidikannya. Kedua indikator pendidikan ini dihadirkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan, dimana LIT mencerminkan proporsi penduduk yang memiliki keterampilan membaca dan menulis dalam kelompok penduduk secara keseluruhan. Sementara itu, angka MYS mencerminkan tingkat kemampuan yang dimiliki penduduk.

b. Indeks Harapan Hidup (Indeks Kesehatan)

Indeks harapan hidup menggambarkan berapa lama penduduk suatu wilayah diharapkan akan hidup. Dengan menampilkan data mengenai jumlah kelahiran dan kematian setiap tahun, harapannya variabel tersebut dapat mencerminkan usia rata-rata serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dikarenakan kendala dalam memperoleh informasi tentang individu yang telah meninggal dalam jangka waktu tertentu, maka untuk mengestimasi angka harapan hidup, digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang diperlukan dalam metode ini adalah rata-rata jumlah anak yang lahir hidup dan masih hidup dari wanita yang pernah menikah. Dengan singkatnya, program mortpak menyediakan proses perhitungan angka harapan hidup. Untuk mendapatkan indeks harapan hidup, kita perlu menghitung rasio antara angka harapan hidup dan rentang nilai maksimum dan minimumnya.

c. Indeks Daya Beli (Indeks Pendapatan)

Daya beli penduduk atau *Purching Power Parity* (PPP) merupakan indeks yang digunakan untuk menilai status ekonomi masyarakat dalam mengukur IPM. Daya beli lebih mencerminkan kemampuan perekonomian suatu masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan konsumen dan sangat berbeda dengan PDRB perkapita atau disebut juga pendapatan per kapita. Untuk mengukur taraf hidup yang baik, data PDRB tidak dapat digunakan karena tidak cocok untuk mengukur daya beli masyarakat. Dengan demikian, cara menghitung daya beli masyarakat dari penggunaan per kapita akan disesuaikan. Setelah menghitung pengeluaran per kapita tahunan yang disesuaikan.

Adapun rumus umum yang digunakan yaitu :

$$IPM = \frac{1}{2} (X1 + X2 + X3)$$

Keterangan:

X1 = Indeks Pendidikan

X2 = Indeks Harapan Hidup

X3 = Indeks Daya Beli

2.1.3 Teori Pengangguran

Pengangguran adalah orang-orang yang diklasifikasikan sebagai bagian dari penduduk aktif yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukannya. Menurut Undang-Undang Ketenaga kerjaan Nomor 25 Tahun 1997 tanggal 1 Oktober, pekerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Perlu diketahui, Indonesia tidak menetapkan batasan usia maksimal pekerja karena Indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional. Pekerja dapat juga didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan atau tugas tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan, seperti gaji

atau upah yang berperan dalam menjalankan proses produksi, memberikan layanan, atau mencapai tujuan tertentu sesuai dengan bidang kerjanya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran merujuk kepada individu yang sedang mencari pekerjaan, tengah mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena mereka menganggap tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, atau yang telah memperoleh pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. BPS mengelompokkan orang dewasa ke dalam beberapa kategori di antaranya sebagai berikut:

1. Bekerja mengacu pada aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperoleh atau membantu dalam memperoleh pendapatan atau keuntungan. Aktivitas ini dianggap sebagai “bekerja” jika dilakukan paling tidak selama 1 jam dalam seminggu yang lalu. Termasuk dalam definisi ini adalah partisipasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk bantuan yang tidak dibayar kepada usaha atau aktivitas ekonomi lainnya. Pengangguran yaitu seseorang yang berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan.
2. Bukan angkatan kerja merujuk pada penduduk yang berusia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 tahun atau lebih, tetapi saat ini sedang mengejar pendidikan, mengurus rumah tangga, atau terlibat dalam aktivitas lain selain kegiatan ekonomi.

Setelah mengelompokkan seluruh individu kedalam tiga kategori (yang bekerja, yang mencari pekerjaan, dan yang bukan angkatan kerja), BPS menghitung berbagai statistik untuk merangkum kondisi angkatan kerja dan tingkat

pengangguran. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Cara menghitung angkatan kerja dalam suatu periode tertentu adalah jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dikurangi jumlah penduduk usia kerja yang tidak ingin bekerja. Perbandingan diantara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan tingkat pengangguran adalah persentase jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah orang yang menawarkan tenaga kerja. Murtadho, Ali (2008:167-189).

Pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain :

1. Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang terjadi akibat tidak bertemunya antara pembuka lowongan kerja dengan pencari kerja yang disebabkan oleh kurangnya informasi, geografi dan lainnya.
2. Pengangguran Struktural, yaitu pengangguran yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja dengan kebutuhan atau permintaan pasar tenaga kerja yang ada.
3. Pengangguran Konjungtural, yaitu pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi atau perubahan dalam kondisi ekonomi jangka pendek, seperti resesi atau penurunan aktivitas ekonomi secara umum. Jenis pengangguran ini terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun, sehingga perusahaan mengurangi produksi dan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja.

Tingkat pengangguran menunjukkan presentase individu-individu yang ingin bekerja namun belum memiliki pekerjaan tingkat pengangguran dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penganggur dengan angkatan kerja. Seseorang dianggap menganggur jika tidak bekerja namun menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja didefinisikan sebagai jumlah antara individu yang memiliki pekerjaan dan pengangguran.

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*), yaitu Pengangguran terbuka merujuk pada individu yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Pekerja yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, baik yang baru pertama kali mencari kerja maupun yang sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya.
2. Pengangguran Setengah Menganggur (*Underemployment*), yaitu kondisi di mana seseorang memiliki pekerjaan, namun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kapasitas, keterampilan, atau waktu yang seharusnya mereka miliki. Dengan kata lain, meskipun mereka bekerja, tetapi mereka tidak bekerja secara optimal atau penuh.
3. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*), yaitu pengangguran yang merujuk pada situasi di mana tenaga kerja yang ada tidak sepenuhnya produktif, namun mereka tetap dihitung sebagai pekerja. Dalam pengangguran

terselubung, meskipun ada pekerjaan, jumlah tenaga kerja yang digunakan melebihi kebutuhan, sehingga tidak semua pekerja memberikan kontribusi produktif.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang.
3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan Kerja Indonesia.
5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

Tingkat pengangguran di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, umumnya tergolong rendah karena upah yang rendah dan adanya proporsi yang sangat besar di sektor informal. Rendahnya tingkat pengangguran di Indonesia umumnya disebabkan oleh penduduknya yang terdiri dari masyarakat miskin yang bersedia melakukan pekerjaan apa pun demi uang atau penghasilan untuk bertahan hidup.

2.1.4 Teori Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya atau kebutuhan dasar untuk hidup dengan layak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan dasar lainnya. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), kemiskinan dapat diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Melalui konsep ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan dan non pangan yang dihitung dari sisi pengeluaran.

Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi terbatasnya sumber daya yang terjadi tanpa diinginkan oleh individu yang bersangkutan. Seseorang dianggap miskin ketika memiliki tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas kerja yang rendah, pendapatan yang minim, masalah kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan hidup yang buruk, yang semuanya menunjukkan suatu lingkaran ketidakberdayaan.

Pemerintah Indonesia mempunyai pemahaman yang lebih jelas mengenai kemiskinan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, yaitu kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau rumah tangga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, serta akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang memadai.

Menurut sharp *et al* (2010:69), Ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan muncul karena ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya yang menghasilkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya terbatas dan sumber daya tersebut seringkali berkualitas rendah. Kedua, kemiskinan timbul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah mengakibatkan produktivitas yang rendah dan, akibatnya, pendapatan yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah ini bisa disebabkan oleh pendidikan yang kurang baik, nasib yang kurang beruntung, diskriminasi, atau faktor keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan dalam akses terhadap modal. Rendahnya akses dan modal menghambat kemampuan individu untuk melakukan investasi, yang selanjutnya berdampak pada ketidakmampuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kemiskinan, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengakibatkan terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Menurut Ragnar Nurske, konsep "lingkaran setan kemiskinan" (*the vicious circle of poverty*) menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan berasal dari tingkat tabungan yang rendah, tingkat investasi yang rendah, kekurangan modal, produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah, dan ini

kembali menyebabkan tabungan yang rendah, serta seterusnya. Dalam lingkaran ini, masyarakat miskin kesulitan untuk keluar dari kondisi kemiskinan karena faktor-faktor ini saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain, menciptakan perangkap kemiskinan yang sulit diatasi. Sangat sulit untuk mengatasi situasi ini tanpa melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena kemiskinan tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek yang lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara berbagai elemen untuk mencari solusi terhadap masalah kemiskinan. (Prawoto, 2008:56-68).

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, dengan jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada.

Bagi sebagian besar masyarakat, mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu masih termasuk kelompok masyarakat termiskin. Orang-orang yang bekerja dengan gaji tetap di sektor publik dan swasta seringkali berasal dari kelas menengah. Siapapun yang tidak mempunyai pekerjaan adalah

miskin, sedangkan mereka yang bekerja penuh waktu adalah orang-orang kaya. Karena terkadang ada pekerja perkotaan yang tidak bekerja sukarela karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka anggap inferior dan melakukannya karena mereka mempunyai sumber daya lain yang dapat membantu mereka memecahkan masalah keuangan mereka. Orang seperti ini bisa digolongkan sebagai pengangguran namun belum tentu miskin. Demikian pula, banyak orang yang bisa bekerja penuh waktu setiap hari dan tetap mendapat penghasilan kecil. Banyak pekerja mandiri di sektor informal bekerja penuh waktu namun seringkali tetap miskin.

Pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara antara lain :

- a. Jika suatu rumah tangga mengalami kendala likuiditas, artinya konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka masalah pengangguran akan berdampak langsung pada kemiskinan pendapatan dan tingkat konsumsi.
- b. Jika rumah tangga tidak menghadapi kendala likuiditas, yaitu konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, namun tidak akan berdampak banyak dalam jangka pendek.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Komposisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan tingkat pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan

peningkatan pendapatan atau upah yang diterimanya. Jika upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak individu dengan tingkat pendidikan tinggi atau pengalaman pelatihan yang baik akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, dan hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya tingkat kesehatan juga berpotensi memberikan dampak positif pada peningkatan pendidikan dan pengembangan potensi diri. Ini akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Pembangunan Manusia berguna dalam membandingkan kinerja pembangunan manusia antar wilayah dan negara. Berdasarkan komponen-komponen yang termasuk dalam IPM, peningkatan tingkat pendidikan seseorang seringkali dikaitkan dengan pendapatan yang diperolehnya. Selain itu, peningkatan kesehatan masyarakat akan meningkatkan partisipasi di pasar tenaga kerja. Jika hal ini terjadi maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan belanja konsumen. Ketika belanja konsumen meningkat, tingkat kemiskinan akan menurun. Di sisi lain, rendahnya IPM menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja penduduk. Produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya angka kemiskinan.

2.1.7 IPM dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Terdapat hubungan yang sangat erat antara IPM dan pengangguran dalam mempengaruhi kemiskinan. IPM menjelaskan apakah hak-hak masyarakat dihormati

dalam hal layanan kesehatan, akses terhadap pendidikan dan pendapatan. Jika tujuan tersebut tercapai maka produktivitas masyarakat akan meningkat atau kualitas sumber daya manusia meningkat. Ketika sumber daya manusia membaik, maka mencari pekerjaan akan lebih mudah dan pendapatan pun meningkat.

Teori pertumbuhan terbaru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia, yang tercermin dalam peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan (*Human Capital*), dapat meningkatkan produktivitas individu. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Menurut pandangan Keynes, peningkatan daya beli masyarakat, yang mencerminkan peningkatan permintaan agregat, memiliki dampak pada kesempatan kerja. Ketika permintaan agregat rendah, perusahaan akan mengurangi produksi dan tidak dapat menyerap tenaga kerja berlebih, sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, seringkali mengakibatkan pengangguran. Menurut Hukum Okun (*Okun's Law*), peningkatan produktivitas yang disebabkan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam proses melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penelitian terdahulu diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan, kesenjangan, dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu berbentuk jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.1 Daftar Penelitian Terdahulu

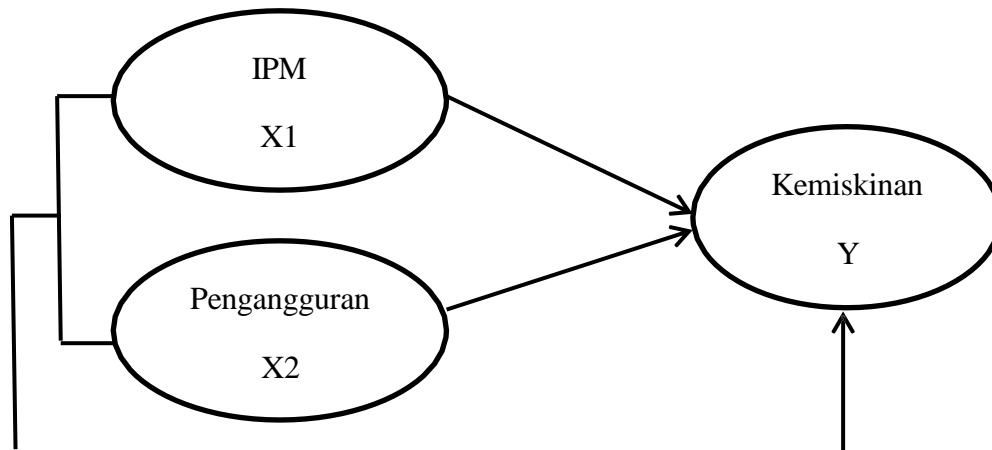
No.	Nama	Judul	variabel	Analisis	Hasil
1.	1. Ari Kristin Prasetyoningrum 2. U. Sulia Sukmawati (2018)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia	X1. IPM X2. Pertumbuhan Ekonomi X3. pengangguran Y. kemiskinan	Analisis jalur	1. Variable IPM berpengaruh langsung dan negative terhadap kemiskinan di Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 3. Pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Indonesia.
2	1. Dani Zanzibar	Pengaruh Indeks	X1. IPM	Regresi linier	1. IPM memiliki hubungan

	<p>2. Fika rahmadania</p> <p>3. Ratri kiswanda</p> <p>4. Misfi laili rohmi (2024)</p>	<p>Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur</p>	<p>X2. Pengangguran</p> <p>Y. Kemiskinan</p>	<p>berganda</p>	<p>positif signifikan dengan kemiskinan</p> <p>2. Tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan</p> <p>3. IPM dan tingkat pengangguran memiliki dampak yang saling berhubungan terhadap tingkat kemiskinan</p>
3.	<p>1. Sayifullah</p> <p>2. Tia Ratu Gandasari (2016)</p>	<p>Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten</p>	<p>X1. IPM</p> <p>X2. Pengangguran</p> <p>Y. Kemiskinan</p>	<p>Regresi berganda</p>	<p>1. Bahwa secara simultan ada pengaruh antara variabel indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan</p> <p>2. Variabel IPM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan.</p> <p>3. Variabel pengangguran menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap variabel</p>

					kemiskinan
4.	1. Puspita Candra Bela 2. Syamsul Huda (2023)	Analisis Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	X1. IPM X2. Pengangguran X3. Jumlah Penduduk Y. Kemiskinan	Analisis data panel	1. IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Yogyakarta 2. Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Yogyakarta 3. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Yogyakarta
5	1. Muhammad Krisna Andi Hakim 2. Riko Setiya Wijaya (2023)	Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	X1. pengangguran X2. Pertumbuhan ekonomi X3. IPM Y. Kemiskinan	Analisis regresi data panel	1. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan 2. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan 3. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

Sumber : data diolah 2024

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan. Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.